

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada suatu negara, pembangunan dilakukan untuk membuat suatu negara menjadi negara yang lebih maju. Pembangunan dalam suatu negara juga dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada pada negara tersebut. Hal ini terjadi di berbagai negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan di suatu negara juga menunjukkan inisiatif dari negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan juga dilakukan untuk menambah devisa dari suatu negara karena keuntungan suatu negara akan bertambah apabila suatu pembangunan dilakukan (Fortuna et al., 2021). Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan di suatu negara dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di negara tersebut sehingga dapat berkembang menjadi negara yang lebih maju.

Masalah kemiskinan saat ini menjadi permasalahan yang harus diatasi di negara berkembang. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk di sebagian besar negara berkembang di dunia. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan penduduk di negara berkembang. Kemiskinan di negara berkembang merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, yaitu mencakup berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, serta hukum. Kemiskinan di negara berkembang juga terjadi karena adanya kebutuhan dan hak dari masyarakat negara berkembang yang tidak terpenuhi. Selain itu, kemiskinan juga membatasi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan (Subayil & Lalu, 2020)

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah saat ini menjadi Provinsi dengan angka kemiskinan menyentuh angka 3.980,90 jiwa (BPS, 2019). Salah satu daerah yang

memiliki tingkat kemiskinan adalah daerah Karesidenan Surakarta. Jumlah persentase penduduk miskin di Karesidenan Surakarta pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1- 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Karesidenan Surakarta**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Boyolali	12.09	11.96	10.04	9.53	10.18
Kab. Klaten	14.46	14.15	12.96	12.28	12.89
Kab. Sukoharjo	9.07	8.75	7.41	7.14	7.68
Kab. Wonogiri	13.12	12.90	10.75	10.25	10.86
Kab. Karanganyar	12.49	12.28	10.01	9.55	10.28
Kab. Sragen	14.38	14.02	13.12	12.79	13.38
Kota Surakarta	10.88	10.65	9.08	8.70	9.03

Sumber: [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kemiskinan di Soloraya memiliki angka yang fluktuatif. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki angka kemiskinan yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Soloraya. Hal ini mengingat Kota Surakarta merupakan satu-satunya Kotamadya yang ada di Soloraya jika dibandingkan di daerah lain. Kotamadya memiliki pusat pemerintahan yang lebih terpusat karena sifatnya yang menjadi pusat pemerintahan dalam suatu daerah. Kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan cenderung memiliki masyarakat yang lebih sejahtera dibandingkan dengan penduduk di luar kotamadya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dalam suatu pusat pemerintahan, kesejahteraan dari masyarakat lebih terjamin daripada daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dikarenakan lokasinya lebih dekat dengan pusat pemerintahan (Suman & Verma, 2021).

Pengaruh pendidikan pada kemiskinan pada suatu daerah dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh suatu negara. Kemiskinan yang ada pada suatu negara dikarenakan adanya pengetahuan yang rendah dari masyarakat dalam suatu daerah. Kurang pengetahuan tersebut meliputi buta huruf dan berhitung. Ketidakmampuan dari masyarakat

dalam mengelola pengetahuan dalam dirinya mengakibatkan pengurangan keterampilan dalam menaikkan taraf hidup bagi masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki pada masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menaikkan taraf hidup mereka sendiri sehingga dapat meminimalisir kemiskinan (Mildyanti & Mike, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, maka rata-rata lama sekolah di karesidenan Surakarta dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 1-2**  
**Rata-Rata Lama Sekolah di Karesidenan Surakarta**

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Boyolali	7,17	7,44	7,55	7,56	7,84
Kab. Klaten	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58
Kab. Sukoharjo	8,58	8,71	8,84	9,10	9,34
Kab. Wonogiri	6,57	6,68	6,88	7,04	7,33
Kab. Karanganyar	8,49	8,50	8,51	8,52	8,56
Kab. Sragen	6,87	7,04	7,22	7,34	7,65
Kota Surakarta	10,37	10,38	10,53	10,54	10,69

Sumber: [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Kota Surakarta menjadi daerah dengan rata-rata lama sekolah tertinggi se-karesidenan Surakarta. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten dengan rata-rata lama sekolah tertinggi kedua dalam hal durasi penduduk mengenyam Pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Sragen justru menjadi yang terendah diantara daerah-daerah lain. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Pendidikan yang lebih maju di daerah perkotaan dikarenakan kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini juga dikarenakan Kotamadya lebih memiliki keterjaminan dalam hal program pemerataan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat (Pradipta & Dewi, 2020)

Selain faktor lama pendidikan, pengangguran juga menjadi faktor yang memengaruhi kemiskinan pada suatu daerah. Tingginya angka pengangguran di suatu daerah akan mengacu pada penurunan kesejahteraan di suatu daerah. Masyarakat yang kurang sejahtera akan memicu tingginya kemiskinan dalam suatu daerah. Kemiskinan pada dasarnya timbul

dikarenakan adanya masyarakat yang kurang sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat yang kurang sejahtera dipicu oleh tingginya angka pengangguran di daerah tersebut. Selain itu, kemiskinan di suatu daerah merupakan akibat dari sempitnya lapangan kerja sehingga memicu terjadinya pengangguran (Niswati, 2014)

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menghimpun data tentang pengangguran di Soloraya dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 1-3**  
**Jumlah Pengangguran di Karesidenan Surakarta**

Kabupaten/Kota	Pengangguran (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Boyolali	2.03	3.67	2.18	3.09	5.28
Kab. Klaten	2.51	4.35	3.14	3.54	5.46
Kab. Sukoharjo	4.52	2.27	2.72	3.39	6.93
Kab. Wonogiri	3.07	2.38	2.28	2.55	4.27
Kab. Karanganyar	3.60	3.17	2.28	3.12	5.96
Kab. Sragen	4.51	4.55	4.83	3.32	4.75
Kota Surakarta	4.53	4.47	4.35	4.16	7.92

Sumber: [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)

Penelitian ini menggambarkan tentang tingkat pengangguran yang dialami oleh masyarakat di Solo Raya. Berdasarkan tabel di atas, Kota Surakarta menempati peringkat tertinggi dalam hal pengangguran, yaitu mencapai 4,53% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini dipicu dari tingginya tingkat persaingan kerja di daerah perkotaan. Selain itu, Kota Surakarta sebagai suatu bentuk Kotamadya memiliki berbagai persaingan dalam dunia kerja seiring dengan kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memiliki tingkat persaingan kerja yang tinggi sehingga memicu banyaknya pengangguran di perkotaan. Hal ini seiring dengan persaingan kerja yang ketat di lingkungan perkotaan (Pramesti & Bendesa, 2018)

Faktor lain yang dapat memengaruhi kemiskinan adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara akan memengaruhi kesejahteraan penduduk di dalamnya. PDRB yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan

pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah yang berasal dari pemasukan pajak, iuran retribusi, atau perputaran ekonomi. PDRB yang tinggi dari suatu daerah dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, PDRB juga menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kemajuan dalam hal pembangunan dan meningkatkan laba bagi daerah sehingga meminimalisir terjadinya kemiskinan (Basuki dan Prawoto, 2017).

Data yang didapat tentang rata-rata PDRB di Solo Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1-4**  
**Rata-rata PDRB di Karesidenan Surakarta**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata PDRB (jutaan)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Boyolali	19,75	20,78	21,85	23,03	22,63
Kab. Klaten	20,40	21,41	22,50	23,67	23,32
Kab. Sukoharjo	26,22	27,51	28,88	30,36	29,63
Kab. Wonogiri	18,77	19,71	20,73	21,74	21,38
Kab. Karanganyar	25,97	27,23	28,61	30,05	29,25
Kab. Sragen	25,65	27,09	28,56	30,15	29,53
Kota Surakarta	58,30	61,39	64,70	68,21	66,84

Sumber: [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kota Surakarta menjadi daerah dengan PDRB tertinggi di Solo Raya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan menjadi daerah dengan pendapatan tertinggi. Hal ini dikarenakan perputaran perekonomian yang lebih intens jika dibandingkan kabupaten. Adanya pusat pemerintahan juga memengaruhi perputaran uang di perkotaan sehingga menjadikan perekonomian di perkotaan lebih mampu menghasilkan PDRB yang lebih banyak dibandingkan kabupaten (Subayil & Lalu, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan, dalam hal ini Kota Surakarta menjadi daerah dengan PDRB terbesar karena posisinya sebagai perkotaan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disusun, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Solo Raya

2. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Solo Raya
3. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Solo Raya
4. Pengaruh rasio ketergantungan terhadap kemiskinan di Solo Raya

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat disusun dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Solo Raya
2. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Solo Raya
3. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Solo Raya
4. Mengetahui pengaruh rasio ketergantungan terhadap kemiskinan di Solo Raya

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tentang berbagai hal yang dapat memengaruhi kemiskinan yang ada di Solo Raya sehingga dapat memperkaya keragaman penelitian
2. Penelitian ini dapat menambah kajian untuk meminimalisir terjadinya kemiskinan di suatu daerah dan cara untuk menanggulangnya
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya agar mampu menyusun penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dengan variabel-variabel yang lebih variatif

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang

penelitian yaitu Kemiskinan, rata-rata lama sekolah, pengangguran, dan PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2016-2020 sebagai obyek penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini juga menjelaskan secara singkat mengapa variabel independen berkaitan dengan variabel dependen.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan Kemiskinan, PDRB, rata-rata lama sekolah, dan pengangguran. Bab ini juga menjelaskan secara singkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada bab ini juga dilampirkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan juga hipotesis penelitian.

Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dari definisi operasional variabel, jenis, dan sumber data, serta model analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian yaitu kemiskinan, PDRB, rata-rata lama sekolah, dan pengangguran. Serta analisis uji statistik dan interpretasi.

Bab kelima adalah simpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang di tunjukan kepada pemerintah berdasarkan dari penelitian ini.